

# KINERJA AGRIBISNIS INDONESIA PASCA KRISIS

## PENDAHULUAN

Era berlakunya AFTA telah menyongsong, yang menuntut adanya usaha yang lebih keras dari para pelaku sektor agribisnis di Indonesia untuk dapat memenangkan kompetisi di pasar bebas dunia. Sumberdaya alam Indonesia yang merupakan modal yang sangat berharga, sehingga keberadaannya sering diagungkan sebagai salah satu faktor yang dapat diunggulkan oleh Indonesia, saat ini sudah tidak dapat diandalkan lagi untuk disombongkan. Selain itu, kapasitas sumberdaya manusia, kondisi ekonomi dan sosio-politik serta produktivitas yang rendah merupakan berbagai kendala utama Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui sektor agribisnis.

Oleh karena itu, kinerja agribisnis di Indonesia sangat ditentukan oleh berbagai terobosan aktivitas agribisnis pasca krisis ekonomi dan moneter yang berpuncak di tahun 1997/1998 yang lalu. Meskipun telah menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan dengan pertumbuhan yang positif, tetapi tanpa pengelolaan yang lebih baik dan lebih serius, produk-produk agribisnis Indonesia masih akan sulit bersaing dengan produk-produk agribisnis dari negara-negara pesaing, sehingga hal tersebut akan menimbulkan masalah yang cukup besar terhadap eksistensi produk-produk agribisnis Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di bawah ini dikemukakan berbagai paparan kinerja agribisnis akhir-akhir ini, yang menyiratkan perlunya perbaikan proses di seluruh lini dan aktivitas, bilamana Indonesia tidak ingin menuai lebih banyak lagi masalah dari keteledorannya selama ini.

## KINERJA SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

Berbagai persoalan pangan muncul dalam beberapa tahun terakhir, terutama ditandai dengan terancamnya ketahanan pangan akibat pasokan pangan dalam negeri yang tidak selalu mampu



mencukupi jumlah kebutuhan yang ada. Selain persoalan klasik berupa musibah banjir ataupun kekeringan, salah satu contoh permasalahan pangan yang serius adalah masalah masuknya beras impor melalui berbagai jalur karena tidak lagi dimonopoli Bulog, serta tarif bea masuk yang sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan harga beras impor lebih murah daripada harga

beras lokal, sehingga beras lokal tidak mampu bersaing dengan beras impor. Selain itu, rendahnya bea masuk serta kurangnya tingkat pengawasan pemerintah dalam menangani impor ilegal juga berdampak terhadap peningkatan penyelundupan dan aktivitas manipulasi dokumen (under-invoice), baik dalam bentuk jumlah maupun harganya.

Masalah tersebut menjadi sangat penting karena munculnya faktor pasokan beras dunia yang tidak menentu. Akan tetapi, faktor lain yang muncul di dalam negeri menjadi lebih penting, ditandai dengan bunga kredit usaha tani (KUT) yang cukup tinggi (10.5 persen per tahun), harga jual beras yang lebih rendah dari harga produksinya, tingkat kepemilikan lahan (land holding capacity) yang sangat rendah (kurang dari 0.25 Ha), kesulitan peningkatan produktivitas, serta mekanisasi dan pola tanam yang tidak mungkin dilakukan secara serentak (Suwandi, 2002).

Kondisi tersebut semakin parah, sejak diberlakukannya harga BBM yang baru pada awal tahun 2003, walaupun sejak tanggal 1 Januari 2003 pemerintah pada dasarnya telah meningkatkan harga dasar gabah dari Rp 1.519,00/kg menjadi Rp 1.725,00/kg (Inpres RI, 2002). Akan tetapi, hal tersebut tidak banyak membantu para petani, karena kenaikan harga dasar gabah tersebut tidak memberikan keuntungan yang cukup banyak bagi para petani. Selain penetapan aturan harga dasar yang terkesan terlalu lambat, harga BBM mengakibatkan peningkatan biaya produksi melalui peningkatan upah tenaga kerja dan biaya penanaman lahan. Peningkatan harga dasar gabah juga tidak berfungsi secara optimal karena tidak ada dukungan yang cukup dari kebijakan pasar melalui

\*) Guru Besar Teknologi Industri Pertanian Fateta dan Direktur Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor

\*\*) Asisten Riset Manajemen Teknologi Industri Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor

---

pembatasan kuantitas impor.

Di lain pihak peningkatan produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai dan tanaman pangan pokok lainnya juga tidak cukup signifikan dalam mengurangi kebutuhan konsumsi akan beras, sehingga kebergantungan impor masih akan tetap terjadi. Dalam hal inilah program penganeekaragaman pangan menjadi semakin penting, dan harus dilaksanakan secara konsisten.

### **KINERJA SUB SEKTOR PERIKANAN**

Secara umum, produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan 4.08 persen selama kurun waktu 1999-2002. Pada tahun 1999, produksi perikanan hanya mencapai 4.89 juta ton, sedangkan tahun 2002, produksi perikanan Indonesia telah mencapai 5.52 juta ton. Jika dibandingkan dengan volume ekspor perikanan pada tahun 2000 (519.42 ribu ton) dan tahun 2001 (546.84 ribu ton), volume ekspor perikanan tahun 2002 hanya mencapai 315.72 ribu ton, atau mengalami penurunan 39.2 persen dari volume ekspor tahun 2000 dan 42.3 persen dibandingkan tahun 2001, sedangkan volume tersebut pada tahun 2001 hanya meningkat 5.5 persen dari volume ekspor perikanan tahun 2000. Meskipun demikian, nilainya meningkat 5.6 % dari nilai ekspor tahun 2001 (USD 1.9 milyar dari USD 1.8 milyar), dan 18.7 % dari nilai ekspor tahun 2000 (USD 1.6 milyar) (Dahuri, 2003).

Di lain pihak, sebanyak 40 persen dari 30 unit industri pengalengan ikan pada tahun 2002 mulai menghentikan produksinya. Langkah tersebut diambil karena telah terjadi krisis bahan baku akibat pengoperasian kapal ikan asing yang semakin marak di perairan Indonesia, sehingga ketersediaan bahan baku untuk industri pengalengan hanya mampu mencapai 30 persen dari kapasitas terpasang. Selain itu, pada saat yang bersamaan, industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 15 persen. Akibatnya, devisa negara merosot cukup tajam, dari USD 110-120 juta menjadi USD 70-80 juta. Nilai pajak impor ikan kaleng yang hanya 5 persen juga semakin menempatkan industri perikanan pada posisi yang tidak kompetitif (MPN 2003 di dalam Sulistyowati, 2003).

Keterpurukan usaha juga mengancam budidaya mutiara. Meskipun pada tahun 2000 terdapat 40 unit perusahaan penghasil mutiara, tetapi setahun kemudian jumlahnya menurun menjadi 26

---

unit, dan pada akhir tahun 2002 hanya tersisa 20 unit usaha budidaya mutiara. Hal tersebut merupakan penyebab utama menurunnya produksi mutiara. Jika pada tahun 2000, dapat dihasilkan mutiara sebanyak 2 250 ton, tetapi pada tahun 2002 hanya mampu dicapai 1 500 ton, sehingga devisa yang diperoleh ikut menurun, dari USD 67.5 juta menjadi USD 22.5 juta, atau berkurang 66 persen (MPN, 2003). Penyebabnya, selain beban pungutan yang terlalu besar, budidaya mutiara juga rawan terhadap pencurian, perampokan dan penjarahan. Dalam hal inilah faktor sosio-politik terbukti sangat berdampak erat terhadap keamanan investasi dalam agribisnis.

### **KINERJA SUB SEKTOR PETERNAKAN**

Nilai ekspor produk-produk peternakan dan hasil ternak pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 20.2 persen dibandingkan nilai ekspor produk sejenis pada tahun 2001, sedangkan nilai impornya menurun hingga 29.0 %. Selain itu, dari sub sektor peternakan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan jenis produk ekspor dengan memunculkan 18 jenis komoditi baru, seperti bibit, daging, susu dan telur tetas untuk 64 negara tujuan ekspor baru. Populasi ternak yang terdiri dari sapi potong, sapi perah, babi, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging secara berturut-turut juga meningkat sebesar 2.2 persen, 2.0 persen, 3.6 persen, 8.3 persen dan 15.2 persen (Sudradjat, 2003).

Hal tersebut menunjukkan kondisi sub sektor peternakan Indonesia yang semakin kompetitif. Selain itu, bebasnya Indonesia dari berbagai jenis penyakit ternak yang berbahaya ikut meningkatkan daya saing produk-produk ternak dan hasil ternak di pasar ASEAN khususnya dan dunia umumnya. Prospek masa depan yang lebih baik diduga akan dirasakan oleh para peternak hingga tahun 2015, akibat adanya peningkatan kebutuhan daging dan susu di Asia yang mencapai 88 kg/kapita/tahun dan 50 kg/kapita/tahun (Gumbira-Sa'id, 2003). Akan tetapi, peningkatan tersebut juga perlu diwaspadai karena hal ini berkorelasi secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan pakan, yang bahan bakunya banyak dipasok secara impor. Manajemen produksi dan sinergi usaha peternakan yang lebih baik sangat dibutuhkan, selain adanya implementasi swasembada bahan baku pakan, terutama jagung dan tepung ikan, melalui kerjasama

antara sub sektor peternakan dengan sub sektor pertanian. Dengan demikian, di masa depan diharapkan akan dapat dicapai efisiensi pakan dan produksi hasil ternak yang lebih kompetitif.

## **KINERJA SUB SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

Pada sub sektor kehutanan terjadi berbagai perubahan, baik dalam bentuk volume maupun nilai ekspor dari beberapa produknya secara beragam. Salah satu contohnya, menurut Ginting (2003), produksi kayu bulat menurun dari 19 juta m<sup>3</sup> pada tahun 1999 menjadi 12 juta m<sup>3</sup> dari tahun 2002 (akan tetapi nilai tersebut diragukan karena diduga terdapat 51 juta m<sup>3</sup> kayu bulat ilegal (illegal logging) yang diperjualbelikan di pasar bebas). Di lain pihak Deperindag (2002) melaporkan ekspor dari industri olahan kayu pada tahun yang sama mencapai USD 3.7 milyar, atau meningkat 0.6 % dari nilai ekspor tahun 2001. Peningkatan nilai ekspor juga dialami industri berbasis hasil hutan lainnya, seperti industri pulp dan kertas (USD 2.4 milyar dengan kenaikan 12.4 %) dan industri rotan olahan (USD 294 juta dengan kenaikan 3.0 %). Akan tetapi ekspor produk olahan hasil hutan ikutan hanya mencapai USD 16.2 juta atau menurun 11.8 % dari nilai ekspor tahun 2001.

Selain itu, Deperindag (2002) melaporkan bahwa pada sub sektor perkebunan telah terjadi peningkatan nilai ekspor produk biji coklat (90.31 %), kopi (23.7 %), teh (7.16 %), olahan kelapa/kelapa sawit (72.3 %) dan olahan karet (26.3 %) secara berturut-turut menjadi USD 445 juta, USD 185 juta, USD 86 juta, USD 2.3 milyar dan USD 1.3 milyar. Di lain pihak penurunan nilai ekspor juga terjadi untuk produk tembakau (20 %), lada putih (6.2 %), lada hitam (12.8 %), vanili (24 %), karet alam (18.4 %) dan tanaman obat (23.2 %) secara berturut-turut menjadi USD 56.2 juta, USD 48.7 juta, USD 25.1 juta, USD 12.6 juta, USD 5.6 juta dan USD 3.6 juta. Sektor perkebunan juga berperan dalam penyediaan lapangan kerja (penyerapan sekitar 16.2 juta tenaga kerja pada perkebunan rakyat) dan pengembangan berbagai usaha pendukung, seperti sarana produksi, jasa angkutan, jasa pengolahan, jasa pemasaran dan sebagainya. Kinerja ekspor produk kehutanan dan perkebunan hingga saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal (krisis ekonomi dan moneter)

maupun faktor eksternal (resesi ekonomi global dan perubahan tatanan perdagangan internasional yang dinyatakan dalam bentuk GATT/WTO, AFTA, APEC dll). Selain itu, muncul pula berbagai permasalahan yang berhubungan dengan proses pemasaran produk dari kedua sub sektor tersebut sebagai berikut.

- Kualifikasi dan spesifikasi produk tidak sesuai dengan permintaan konsumen.
- *Bioterrorism* Act di USA diduga akan menghambat secara nyata ekspor produk Indonesia ke USA.
- Kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu kirim sering tidak dapat dipenuhi.
- Hambatan tarif/diskriminasi tarif dari beberapa negara tujuan ekspor
- Sistem informasi pasar belum berkembang
- Pengembangan jaringan pemasaran di negara tujuan ekspor belum optimal.
- Sosialisasi cara-cara pemasaran internasional produk perkebunan masih kurang.
- Promosi dan advokasi produk masih belum optimal
- Dukungan pemerintah dalam bentuk kredit ekspor masih sangat terbatas.

Dengan demikian, dimulainya perdagangan bebas AFTA bagi Indonesia sebenarnya masih menimbulkan resiko yang sangat berat. Kondisi perekonomian negara yang semakin memburuk dan diwarnai dengan berbagai ketidakpastian sosial-politik diduga akan mengakibatkan Indonesia terjebak dalam kegiatan pasar bebas, sehingga sulit untuk mampu bertahan. Meskipun agribisnis merupakan sektor yang paling mampu bertahan pasca krisis moneter, tetapi sektor tersebut dinilai belum mampu bersaing di dunia pasar bebas. Setidaknya, hingga saat ini hanya terdapat lima jenis produk dari 15 komoditi yang telah siap bersaing dalam perdagangan bebas, yaitu furnitur, karet, tekstil, minyak nabati dan produk-produk kulit (Adiningsih, 2001).

Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor agribisnis saat ini adalah rendahnya apresiasi produsen dalam negeri terhadap kualitas, pelestarian lingkungan dan isu kesehatan, sehingga mereka belum terbiasa menghasilkan produk yang memenuhi standar. Selain itu, harga produk-produk

agribisnis Indonesia diduga akan semakin sulit bersaing karena produktivitas yang rendah. Dari subsektor tanaman pangan, misalnya, produktivitas padi hanya mencapai 4.43 ton/Ha jika dibandingkan dengan produktivitas padi di RR Cina (6.23 ton/Ha), sedangkan dari sub sektor perkebunan, produktivitas kelapa sawit hanya mencapai 11.52 ton TBS/Ha terhadap produktivitas kelapa sawit di Malaysia (17.04 ton TBS/Ha). Selain itu, produktivitas kedelai hanya mencapai 1.23 ton/Ha, sedangkan RR Cina mampu mencapai produktivitas sebesar 1.7 ton/Ha (<http://www.agroindonesia.com>). Produktivitas seharusnya dijadikan fokus dalam peningkatan kinerja agribisnis karena produktivitas yang rendah mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi.

Di lain pihak, kinerja agribisnis di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi produktivitas maupun kualitas sumberdaya manusia, tetapi juga masalah permodalan. Setidaknya telah terdapat 49 perusahaan yang menjalankan aktivitasnya melalui praktek *profit sharing*, dan telah melibatkan ribuan investor. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berhasil menghimpun dana di bidang perkebunan, hortikultura, peternakan, maupun industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Akan tetapi, sekitar 90 persen dari jumlah tersebut sudah tidak beroperasi dan tidak mampu mengembalikan dana pokok dan keuntungan pada para investornya, bahkan beberapa diantaranya memiliki indikasi melakukan berbagai penipuan (Adnan, 2003).

Meskipun masyarakat yang berinvestasi dalam kegiatan *profit sharing* telah banyak dirugikan, pemerintah terkesan sangat lambat dalam menangani dan menindaklanjuti kasus tersebut. Hingga saat ini pemerintah baru mempersiapkan Keputusan Presiden yang mengatur bisnis *profit sharing*. Dalam peraturan yang sedang direncanakan tersebut, ditetapkan bahwa perusahaan *profit sharing* tidak boleh menarik dana dari masyarakat secara langsung, tetapi melalui institusi lain, dengan menggunakan tiga cara, yaitu investor berfungsi sebagai pemegang saham, investor tergabung dalam koperasi ataupun pembentukan pasar modal (Adnan, 2003).

Dengan berbagai permasalahan dan kendala yang muncul di atas, kinerja agribisnis Indonesia secara jelas harus lebih diperbaiki dan peranannya

ditingkatkan. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat rendahnya kualifikasi dan kesiapan produsen maupun proses pemasaran produk-produk agribisnis sangat menentukan kemampuan produk-produk lokal untuk mampu bersaing secara terbuka dengan produk-produk impor. Oleh karena itu, manajemen sumberdaya alam, sumberdaya manusia, penanganan investasi, implementasi teknologi terapan serta kepastian hukum harus dijadikan kunci utama dalam peningkatan kinerja agribisnis di Indonesia.

#### REFERENSI :

- Adiningsih, S. 2001. Tak Satu Pihak pun Yakin atas Kemampuan Indonesia Menghadapi AFTA. <http://www.agroindonesia.com/news/ind/2001/mei/03-05-01.htm>.
- Adnan, H. 2003. Kepres "Profit Sharing" Mendesak. Pengusaha Edisi Maret/Th II/2003. Jakarta.
- Dahuri, R. 2003. Volume Ekspor Perikanan Menurun. Kompas 2 Januari 2003. MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) Jakarta.
- Deperindag (Departemen Industri dan Perdagangan). 2003. Ekspor Nonmigas Utama Menurut Sektor. <http://www.dprin.go.id>.
- Ginting, L. 2003. Walhi Minta Penerapan "*Industrial Logging Moratorium*". Tempo Interaktif. 16 Januari 2003. Jakarta.
- Gumbira-Sa'id, E. 2003. Peluang Sektor Agri Pasca AFTA. Pengusaha Edisi Maret/Th II/2003. Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2002 Tentang Penetapan Kebijakan Perberasan. 31 Desember 2002. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Jakarta.
- MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara). 2003. 40 Persen Industri Kelautan Tutup Usaha. Kompas 21 Januari 2003. Jakarta.
- MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) 2003 di dalam Sulistyowati, R. 2003. Pengusaha Pengalengan Ikan Minta Penurunan Bea Masuk. Tempo Interaktif 20 Januari 2003. Jakarta.
- Sudradjat, S. 2003. Peternakan Paling Siap Hadapi AFTA. Kompas 4 Januari 2003. Jakarta.